

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI DALAM  
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(Studi Kasus SIMNANGKIS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh**

**ADELIA PUTRI RAMADANI**

**NPM 1866021001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi kasus. SIMNANGKIS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

OLEH

ADELIA PUTRI RAMADANI

Perkembangan sistem teknologi informasi yang pesat saat ini menjadi peluang bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan, salah satunya permasalahan dalam program penanggulangan kemiskinan. Dengan pengembangan suatu sistem basis data, yaitu Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan atau SIMNANGKIS diharapkan dapat menghasilkan data kemiskinan yang akurat, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran penerimanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem aplikasi yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian dengan menggunakan indikator penerapan yakni: *Pertama*, pada indikator komunikasi, penerapan aplikasi Simnangkis memiliki komunikasi yang baik antar OPD sehingga kejelasan tujuan aplikasi tersebut dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. *Kedua*, pada indikator Sumber Daya Manusia, didukung oleh SDM yang berkualitas yaitu Tim TKPK Provinsi Lampung. *Ketiga*, pada indikator sikap, penerapan aplikasi Simnangkis mendapat dukungan dan tanggapan yang positif dari para OPD. *Keempat*, pada indikator struktur birokrasi, pengawasan data kemiskinan dalam aplikasi Simnangkis dikelola dan diawasi langsung oleh Pemerintah Pusat di bawah Kementerian Sosial, sehingga data tersebut tidak dapat *diupdate* dan diakses secara sembarangan. Penerapan sistem ini sudah sesuai dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat memberikan hasil yang baik dalam rangka penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan yang tepat objek dan tepat sasaran penerimanya.

Kata Kunci : Kemiskinan, Program Penanggulangan Kemiskinan, Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS IN THE PREPARATION OF POVERTY REDUCTION PROGRAMS (Case studies. SIMNANGKIS at the Regional Development Planning Agency of Lampung Province)**

**By**

**ADELIA PUTRI RAMADANI**

The rapid development of information technology systems is currently an opportunity for the government to overcome problems, one of which is problems in poverty reduction programs. With the development of a database system, namely the Poverty Reduction Information System or SIMNANGKIS is expected to produce accurate poverty data, so that poverty reduction programs can be targeted by the recipients. The purpose of this research is to find out the application system that is used as a reference in the preparation of poverty reduction programs. This research uses a qualitative descriptive type of research with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results of the study using application indicators are: *First*, in the communication indicator, the application of simnangkis application has good communication between OPD so that the clarity of the purpose of the application is understood by the individuals responsible for achieving the goal. *Second*, on the Human Resources indicator, supported by qualified human resources, namely the Lampung Provincial Crime Scene Team. *Third*, on attitude indicators, the application of Simnangkis application received positive support and response from OPDs. *Fourth*, in indicators of bureaucratic structure, poverty data supervision in the Simnangkis application is managed and supervised directly by the Central Government under the Ministry of Social Affairs, so that the data cannot be updated and accessed carelessly. The application of this system is in accordance with its goals, so that it can provide good results in order to reduce poverty rates through poverty reduction programs that are right objects and targeted recipients.

**Keywords:** Poverty, Poverty Reduction Program, Poverty Reduction Information System.

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI DALAM  
PENYUSUNAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(Studi Kasus SIMNANGKIS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**ADELIA PUTRI RAMADANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : **ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus. SIMNANGKIS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Adelia Putri Ramadani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1866021001**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**  
NIP. 196112181989021001

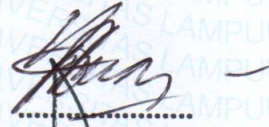
2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**  
NIP. 196112181989021001

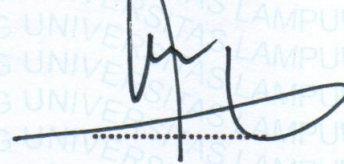
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P**



**Penguji : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 19610807 197803 2 001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Maret 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 Maret 2022  
Yang Membuat Pernyataan



Adelia Putri Ramadani  
NPM. 1866021001

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adelia Putri Ramadani, tempat tanggal lahir Bandar Lampung pada tanggal 03 Desember 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Susi Lawati. Memiliki seorang kakak laki-laki bernama Adjie Agung Setiawan dan adik laki-laki bernama Dede Aprizal. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari tahun 2006-2012 di sekolah dasar (SD)

Negeri 03 Sawah Brebes. Setelah lulus SD, penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 05 Bandar Lampung Tahun 2012-2015. Melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung Tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung dengan jalur Seleksi Mandiri Unila (SIMANILA) melalui Prestasi Khusus, dan dinyatakan lulus pada jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA 2018 dengan prestasi khusus yang dimiliki penulis pada bidang Non Akademik.

Selama penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri penulis. Pada tahun 2019-2020 penulis menjadi bagian dari divisi hubungan masyarakat pada Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI), dan menjadi bagian staff Bisnis dan Kemitraan pada Bina Rohani Islam Mahasiswa Universitas Lampung (Birohmah). Penulis juga menjadi salah satu Atlet Karate Lampung pada Tahun 2018-2020.



Penulis sempat mengikuti Program Kampus Merdeka Belajar pada tahun 2021 yang diselenggarakan pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 5 (lima) bulan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung. Demikian sekelumit aktivitas penulis di masa kuliah sejak rentan tahun 2018-2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai jalan menuju hidup yang lebih bermanfaat.

## **MOTTO**

Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah swt bersama kita

**(QS. At Taubah : 40)**

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

**(QS. Al Insyirah : 05)**

Hidup yang tak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan

**(Sutan Sjahrir)**

Katakan bahwa engkau yang terbaik,  
bahkan sebelum engkau menjadi apa-apa

**(Adelia Putri Ramadani)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

### ***Ibu dan Bapak Tercinta***

Susi Lawati dan Mulyadi

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasamu demi membesarkan putri tersayang menjadi insan yang berguna

Kakak-adik tersayang

Adjie Agung Setiawan dan Dede Aprizal

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

### *Bismillaahirrohmaanirrohim.*

Syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Informasi Dalam Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan (studi kasus SIMNANGKIS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)". Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya, serta telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf atas segala nikmatMu. Terimakasih atas segala limpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam yang selalu tercurah dalam setiap proses hidup yang hamba jalani, terimakasih atas kebesaranMu yang selalu memberikan kedamaian jiwa, serta hati yang lapang dalam menempuh kesulitan dihadapi.
2. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si, selaku Pembimbing Akademik. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan pada Allah SWT.
5. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan, saran, kritik, dan motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah Bapak dan selalu diberikan kesehatan untuk terus membawa jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi Nomer satu.
6. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. Selaku Dosen Pembahas. Terimakasih atas segala masukan dan kritik yang luar biasa dan sangat membantu saya dalam proses penulisan skripsi saya, sehingga saat ini skripsi saya terselesaikan dengan baik. Terimakasih banyak pak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk Bapak beserta keluarga.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua.

Saya sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup saya.

8. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mba Shella dan Mas Juni. Terimakasih sudah direpotkan dalam urusan administrasi perkuliahan, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
9. Ibu Dra. Evie Fatmawaty, M.Si, selaku sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Ibu Zakiah Drajat, S.I.Kom, selaku Kassubag Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Terimakasih telah diberi kesempatan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan, serta melakukan penelitian di Badan Instansi tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan.
10. Ibu Siti Masitoh, S.E. Selaku Pembimbing Lapangan PKL dan penelitian, terimakasih banyak atas banyak pengalaman yang diberikan kepada saya, terimakasih untuk masukan, kritik, dan motivasi dalam dunia perkuliahan terutama dalam proses penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu selama membimbing saya, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan pada Ibu dan Keluarga.
11. Ibu Eka Yuslita Dewi, ST., MT., Bapak Prayudi Aribowo, S.STP., Bapak Puriatma Nur Utomo, S.STP., dan para pegawai P3M Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Terimakasih telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai informan dalam penelitian ini. Untuk Bapak M. Roby Satria Pratama, S.T. Terimakasih telah membantu dalam penyusunan skripsi melalui dokumen-dokumen yang tersedia, serta para pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung khususnya bidang secretariat, yaitu : Mba Desi, Bang Robi, Bang Yuda, dan Bapak Lawak, terimakasih juga telah memberikan pengalaman dalam dunia kerja. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

12. Kepada orangtua tercinta, Umma Susi atau Makncus-ku dan Bapak Mulyadi. Terimakasih untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan penulis menjadi insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi oranglain. Mungkin ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua tetesan keringat dan doa yang tak terhenti terpanjat untuk membesarkan putrimu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan bapak dan ibu. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah keluar atas tindakanku. Berjuta terimakasih tidak akan terbalas untuk semua jasa bapak dan ibu. Semoga setiap langkahku membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk bapak dan ibu, serta ilmu yang didapat dari pendidikanku dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah untuk bapak dan ibu. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun bapak dan ibu berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum Bahagia di wajah bapak dan umma-ku tersayang.
13. Kepada Kakek dan Nenek saya, Uti dan Kung. Terimakasih telah menjadi orangtua kedua saya, terimakasih untuk segala doa yang terpanjat untuk kesuksesan cucunya. Semoga uti dan kakung diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.
14. Kepada diri sendiri, Adelia Putri Ramadani terimakasih telah berjuang melawan rasa malas dan rasa yang pernah hampir membuat diri menyerah. Perjalanan dalam hidup tidak berhenti sampai disini, terus semangat dan jangan berhenti dalam berdoa.
15. Kepada kakak dan adikku tersayang, Adjie Agung Setiawan dan Dede Aprizal, dua jagoan laki-laki setelah bapak dalam hidupku. Terimakasih untuk kakakku, kak Jibon yang telah menjadi pelindung tanpa ingin diketahui adiknya, dan terimakasih untuk adikku, Dede “*bayi*” yang selalu

menghibur dirumah dan siap antar jemput kemanapun. Semoga kita bertiga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

16. Kepada keluarga besar yang selalu bertanya "*kapan lulus?*". Alhamdulillah sekarang sudah lulus, terimakasih untuk doa dan dukungannya.
17. Untuk keluarga besar Pejuang Toga (Tania, Salsa, Hani, Robby, Anjas, Helmi, Harido, Gilang, dan Fadil). Terimakasih telah kebersamai selama masa perkuliahan, bersyukur kenal kalian yang menjadi penyeimbang dalam mengingat antara dunia dan akhirat. Semangat gais abis ini kita jadi pejuang cuan ya.
18. Untuk orang-orang yang menemaniku dalam semester akhir. Tania Lorenza, dari masa Pra PaperMob sampai sekarang alhamdulillah masih bersama, tempat berkeluh kesah dalam segala hal, terimakasih telah memberikan masukan dan dorongannya (jangan ngerasa sendiri ya tin, walaupun kadang suka tiba-tiba jauh tetap ingat kalo saya juga tetap rumah kamu). Salsabila Mufhidah, dari masa PKKMB sampai sekarang alhamdulillah masih bersama, tempat yang selalu mengingatkan kebaikan dan selalu mengajak untuk terus memperbaiki diri (semoga till Jannah ya tu). Siti Hani, bagian dari keluarga pejuang toga (semangat skripsinya teh). Riska Widi Astuti yang selalu open kosan sebagai tempat berteduh (terimakasih ya riska, inget skripsi dikerjain).
19. Untuk teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu Ferawati, Oktapiana, dan Riska. Terimakasih telah memberikan masukan dan dorongan semangat pada proses penyusunan skripsi, terutama saat penelitian di Bappeda Provinsi Lampung. Semoga kita semua jadi orang sukses ya, Aamiin ya Rabb.
20. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan, Diana, Tasya, Nikita, Yani, Apri, Taufik, Andi, Hesti, Mei, Wiwid, Redo, dan teman-teman lainnya. Terimakasih telah memberikan banyak momen.



21. Teman-teman Stay Cool terimakasih telah memberikan energi positif. Teman seperjuangan, Cacak dan Dian Nur Utami terimakasih telah menjadi pendengar saat waktu overthinking tiba.
22. Teruntuk seseorang yang Namanya tidak dapat disebut, namun selalu tercurah dalam doa. Terimakasih untuk doa, motivasi, dukungan, serta dorongan semangatnya dalam menyelesaikan perkuliahan ini, dan juga terimakasih masih membersamai hingga saat ini. Ketika dua insan saling menyukai tidak harus bersama saat ini juga, ada kalanya dibutuhkan perjuangan dahulu untuk menciptakan kebersamaan yang lebih baik lagi kedepannya. Setiap kesabaran akan digantikan dengan kemenangan. Semoga kita menjadi dua insan pemenang setelah banyak melewati perjuangan yang harus dibayar dengan rasa sabar, dan semoga kita senantiasa selalu menjaga dalam doa. *Tertanda 06*.
23. Terima kasih untuk semua yang menyayangi saya dan selalu mendoakan saya.

Bandar Lampung, 07 Maret 2022

Adelia Putri Ramadani

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Tinjauan Implementasi .....	11
2.1.1 Pengertian Implementasi .....	11
2.1.2 Model Implementasi .....	13
2.2 Tinjauan Sistem Informasi .....	16
2.2.1 Pengertian Sistem Informasi .....	16
2.2.2 Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan .....	17
2.2.3 Peran Data dan Informasi dalam Penyusunan Program atau Pengambilan Putusan .....	19
2.2.4 Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS) .....	20
2.3 Penyusunan Program Pembangunan Daerah .....	22
2.4 Kerangka Pikir .....	26

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	28
3.3 Fokus Penelitian .....	29
3.4 Informan .....	30
3.5 Sumber Data .....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	33
3.8 Teknik Analisis Data .....	34
3.9 Teknik Validasi Data .....	35
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Bappeda Provinsi Lampung .....	37
4.1.1 Sejarah Bappeda Provinsi Lampung .....	37
4.1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Lampung .....	39
4.1.3 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Lampung .....	40
4.1.4 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai .....	41
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
5.1 Sistem Aplikasi Simnangkis .....	47
5.2 Hasil Penelitian Penerapan Aplikasi Simnangkis .....	48
5.2.1 Komunikasi .....	48
5.2.2 Sumber Daya .....	55
5.2.3 Sikap atau <i>Disposisi</i> .....	60
5.2.4 Struktur Birokrasi .....	62
5.3 Hasil Pembahasan Penerapan Aplikasi Simnangkis .....	66
5.3.1 Komunikasi .....	67
5.3.2 Sumber Daya .....	75
5.3.3 Sikap atau <i>Disposisi</i> .....	77
5.3.4 Struktur Birokrasi .....	78

<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
6.1 Kesimpulan .....	79
6.2 Saran .....	81
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2019 – Maret 2020 .....	2
2. Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	6
3. Tabel 3.1 Daftar Informan .....	31
4. Tabel 4.1 Visi dan Misi .....	40
5. Tabel 5.1 Indikator Utama Penanggulangan Kemiskinan .....	59
6. Tabel 5.2 Triangulasi Data .....	64
7. Tabel 5.3 Rekapitulasi Data DTKS Per-Desil Provinsi Lampung 2020 .....	68
8. Tabel 5.4 Rumah Tidak Layak Huni Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2020 .....	69
9. Tabel 5.5 Angka Putus Sekolah Penduduk Miskin .....	70
10. Tabel 5.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2020 – Maret 2021 .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 2.1 Model Pengelolaan Data Menjadi Informasi .....	19
2. Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	26
3. Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	41
4. Gambar 5.1 Strategi Pengentasan Kemiskinan .....	57
5. Gambar 5.2 Pembentukan Tim TKPK Provinsi Lampung .....	60
6. Gambar 5.3 Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin di Provinsi Lampung .....	71
7. Gambar 5.4 Halaman Utama Simnangkis .....	75
8. Gambar 5.5 Pencarian Data .....	76

## DAFTAR SINGKATAN

BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BDT	: Basis Data Terpadu
BPS	: Badan Pusat Statistik
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
JAMKESMAS	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PBDT	: Pemutakhiran Basis Data Terpadu
PERPRES	: Peraturan Presiden
PKH	: Program Keluarga Harapan
RASKIN	: masyarakat miskin
SIMNANGKIS	: Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan
SOP	: <i>Standar Operating Procedures</i>
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TIK	: Teknologi Informasi Komunikasi
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat berkembang diseluruh negara, salah satunya Indonesia. Era internet menjadi penentu perubahan saat ini, khususnya berkaitan dengan derasnya arus informasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Berkembangnya teknologi dan informasi pun banyak menyentuh berbagai bidang, termasuk bidang pemerintahan. Hal ini membuat suatu instansi harus mengikuti arus teknologi agar dapat terus memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi pada suatu instansi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan, salah satunya dalam hal penyusunan program melalui pengembangan sistem informasi.

Jogiyanto dalam Syakti (2013: 126) mendefinisikan sistem informasi sebagai sebuah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang. Adanya perkembangan teknologi informasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan data dan informasi menjadi hal yang paling penting. Pemanfaatan sistem teknologi informasi saat ini menjadi peluang bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan terkait permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan menjadi tantangan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang



Dasar 1945, amandemen ke-empat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Permasalahan kemiskinan saat ini menjadi tantangan utama pembangunan Provinsi Lampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan umumnya berkaitan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Kemiskinan menjadi salah satu penyakit ekonomi dan masalah sosial yang sangat penting untuk diminimalisir atau bahkan dihapuskan dalam kehidupan masyarakat, apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi masalah kemiskinan, maka suatu negara akan mengalami keterbelakangan. Keterbelakangan dalam pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia serta keterbelakangan pembangunan perekonomian yang akan menyebabkan negara tersebut dikuasai oleh negara-negara lain yang lebih maju (Istan 2017, 82).

Perkembangan tingkat kemiskinan di Lampung pada Maret 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 12,34% pada Maret 2020. Berikut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) :

**Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2019 – Maret 2020**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2019	231,86	8,92 %
September 2019	224,69	8,60 %
Maret 2020	237,10	9,02 %
<b>Perdesaan</b>		
Maret 2019	831,80	14,27 %
September 2019	816,79	13,96 %
Maret 2020	812,22	13,83 %
<b>Total</b>		
Maret 2019	1 063,66	12,62 %
September 2019	1 041,48	12,30 %
Maret 2020	1 049,32	12,34 %

*(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019, September 2019 dan Maret 2020)*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2020 mencapai 1,05 juta orang. Jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 7,84 ribu orang dibandingkan September 2019. Namun, jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 14,34 ribu orang. Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) pun memperlihatkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung berdasarkan daerah tempat tinggalnya, pada periode September 2019 - Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 12,41 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 4,57 ribu orang. Jika dibandingkan berdasarkan persentase, kemiskinan di perkotaan naik dari 8,60 persen menjadi 9,02 persen, sementara itu di perdesaan turun dari 13,96 persen menjadi 13,83 persen.

Upaya program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan pemerintah, sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pemerintahan baru, terbit Peraturan Presiden Nomor 166 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat (Perpres RI No 166 Tahun 2014). Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan juga langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan pula diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, *monitoring* dan evaluasi.

Menurut data statistik, derajat kemiskinan di Provinsi Lampung semakin meningkat walaupun jumlah penduduk miskin dari hari ke hari menurun, hal ini dikarenakan program penanggulangan kemiskinan tidak menyentuh langsung hak-hak dasar kelompok miskin. Berbagai upaya program

penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, namun upaya pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut belum terlaksana secara optimal dan belum dapat dikatakan berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan. Permasalahan yang sering terjadi dalam program penanggulangan kemiskinan, yaitu tidak akuratnya data kemiskinan yang menyebabkan program tersebut tidak tepat sasaran dan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan laporan dari Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan, ada beberapa program yang tidak tepat sasaran diantaranya seperti : pemberian beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), dan beasiswa bagi siswa miskin. Hasil *monitoring* yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pemberian raskin masih ada yang belum tepat sasaran dan tepat jumlah karena program tersebut menjangkau masyarakat yang tidak miskin juga, sementara itu masih adanya keluhan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait program Jamkesmas di Provinsi Lampung yang menyoroti bahwa ada sebagian masyarakat miskin yang belum dapat mengakses Jamkesmas karena tidak terdata sebagai penerima Jamkesmas. Melihat kondisi tersebut, data kemiskinan yang tidak akurat dan tidak tertata baik inilah yang akan menyebabkan permasalahan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang menjadikan program tersebut tidak selaras antara program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan program penanggulangan kemiskinan belum tepat objek dan sasaran yang berhak menerimanya, sehingga angka kemiskinan belum serta-merta menurun (Syakti 2013: 125).

Upaya pemerintah setelah diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah meluncurkan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), yaitu kegiatan nasional yang bertujuan untuk memastikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai komponen utama dalam sistem penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. BDT saat ini disebut sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang akan dijadikan sebagai basis data

kemiskinan, DTKS akan menampilkan informasi rumah tangga dan individu berdasarkan *by name by address*.

Pendataan kemiskinan ini akan menjadi acuan penyusunan program dalam rangka mengurangi kemiskinan. Mengingat urgensi penyediaan data kemiskinan di daerah dan sebagai tindak lanjut dari upaya program penanggulangan kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Provinsi Lampung menyusun aplikasi sistem informasi data kemiskinan bertajuk Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai yaitu SIMNANGKIS. Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan ini dijadikan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, serta menjawab amanat Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Nugroho 2015: 02). Sistem aplikasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dalam rangka penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan yang tepat objek dan tepat sasaran penerimanya.

Berkaitan dengan penerapan aplikasi Simnangkis tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di salah satu instansi yang menangani peluncuran aplikasi tersebut, yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan judul penelitian ”Analisis Penerapan Sistem Informasi Dalam Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan (studi kasus Simnangkis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)”

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Frans Imam Hasyah (2021)	Analisa Penerapan Sigertak Plus	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Sigertak merupakan <i>tools</i> yang

		Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	dapat digunakan sebagai alat evaluasi program kemiskinan yang dilaksanakan seluruh <i>stakeholder</i> di Sumatera Selatan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan, karena semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
2.	Agus Purnomo dan Sefty Setya Utami (2018)	Analisis Implementasi Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kota Bandar Lampung)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, beserta faktor pendukung dan faktor penghambat berjalannya suatu program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini terdapat implikasi dari hasil kesimpulan, yakni

			menjelaskan jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program, melibatkan mereka dalam menentukan jenis program yang dibutuhkan. Hal ini merupakan salah satu kunci ketepatan menentukan jenis program yang dibutuhkan dan masyarakat/keluarga yang berhak menerima program tersebut.
3.	Firamon Syakti (2013)	Sistem Informasi Data Kemiskinan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan	Hasil dari penelitian ini menjelaskan sebuah Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIMDASKIN) yang merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah daerah kabupaten Banyuasin untuk melakukan pendataan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Banyuasin. Pendataan yang ada pada sistem informasi data kemiskinan ini meliputi tingkat kemiskinan seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Aplikasi ini juga Memberikan masukan kepada <i>stakeholder</i> yang ada pada Kabupaten Banyuasin dalam hal

			pengambilan kebijakan mengentaskan kemiskinan.
4.	Irmayani dan Suradi (2018)	Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data di Kota Semarang	<p>Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dalam rangka menjelaskan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data. Keterpaduan data dimaksud adalah satu data kemiskinan yang digunakan sebagai basis dalam penanggulangan kemiskinan oleh OPD-OPD di Kota Semarang.</p> <p>Penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis pada keterpaduan data. Setiap OPD yang menyelenggarakan program kemiskinan memiliki data kemiskinan sendiri-sendiri dan sampai saat ini belum pernah dipadukan. Hal ini apabila hal ini terus berkelanjutan, maka Kota Semarang akan sulit mencapai target penurunan angka kemiskinan, karena apabila target OPD-OPD tersebut dijumlahkan, maka melebihi jumlah keluarga miskin di Kota Semarang.</p>
5.	Rizky Qinthara Syahriar dan Ary Syahriar (2006)	Peran Teknologi Informasi dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa TIK mempunyai nilai pengaruh dalam usaha penurunan angka kemiskinan, hal ini selain dapat

			<p>menunjang tersedianya informasi baik mengenai lapangan pekerjaan yang dapat menjadi peluang bagi mereka dan keadaan pasar yang dapat meningkatkan usaha mereka apabila mereka memiliki usaha, dapat juga membuka kesempatan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah menggalakkan pengajaran mengenai penggunaan komputer bagi rakyat miskin dan penyediaan warnet gratis untuk mereka.</p>
--	--	--	---

*(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021)*

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada fokus penelitiannya, penelitian kali ini akan mengkaji bagaimana suatu penerapan aplikasi Simnangkis sebagai acuan penyusunan program sehingga menghasilkan program-program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Penelitian ini juga menjadi sebuah lanjutan dari penelitian terdahulu yang mana terdapat implikasi atau rekomendasi bahwa dalam program pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal dikarenakan data-data kemiskinan kurang tepat sasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan suatu fenomena dari penerapan sistem yang akan dijadikan sebagai acuan penyusunan dalam program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan aplikasi “SIMNANGKIS” sebagai acuan penyusunan program penanggulangan kemiskinan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan aplikasi Simnangkis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan aplikasi Simnangkis dalam program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Secara Teoritis :**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, pemikiran dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

### **2. Secara Praktis :**

Sebagai acuan untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan suatu masyarakat sehingga dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat Provinsi Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Implementasi**

#### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga disebut sebagai suatu proses rangkaian pada kegiatan yang akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Menurut Nawi dalam Rahmawati (2020: 07) implementasi didefinisikan sebagai sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Inti dasar dari suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan wujud pelaksanaan dalam mempertanyakan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan adanya sebuah pembuatan prosedur implementasi kebijakan yang sesuai dengan alokasi sumber daya untuk dapat dikembalikan pengimplementasiannya sesuai dengan evaluasi implementasi yang diterapkan (Nugroho dalam Rahmawati, 2020: 10). Menurut Edward III, implementasi kebijakan yang efektif ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap, tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi

berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Dalam proses kebijakan publik sebuah implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting. Hal ini agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sebuah kebijakan sebagai hasil proses politis yang harus diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata dan tindakan melalui proses implementasi. Setelah tahap formulasi kebijakan dilalui, implementasi bisa disebut pernyataan kebijakan (*policy statement*) yang terdapat dalam sebuah kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan melalui berbagai langkah yang konkrit (Nasution dan Nurwani, 2021: 110).

Terdapat berbagai unsur-unsur penting di dalam pengertian implementasi, seperti : 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik, sedangkan implementasi kebijakan publik yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan (Nugroho dalam Rahmawati 2020: 9).

Kesimpulan dari berbagai pendapat ahli tentang konsep implementasi yaitu implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses-proses yang berupa berbagai tindakan aktor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan aktivitas pencapaian tujuan. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, munculnya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program dengan baik.

### **2.1.2 Model Implementasi**

*A Model of the Policy Implementation* merupakan model implementasi yang dirumuskan oleh Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Model implementasi ini menggunakan penekanan pada proses yang dilandasi asumsi bahwa para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya *output* dan *outcomes* kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penerapan Simnangkis mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

Menurut Edward dalam Rahmawati (2020: 32) “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*Resource*), Sikap (*Disposition*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)”. Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Berikut secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik menurut model George C. Edward III (dalam Natsir, 2017: 19-22) dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula, agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah sebuah implementasi dapat terlaksana. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya implementor tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan bingung dengan apa yang akan dilakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

#### 2) Sumber daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, serta cukup untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya wewenang yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung

yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk melakukan penerapan kebijakan. Untuk itu, perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerjanya. Informasi merupakan sumber daya lainnya yang penting bagi pelaksana kebijakan.

3) *Disposisi* atau sikap

*Disposisi* adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka sebuah kebijakan akan dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar, *Standar Operating Procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks serta menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 2.2 Tinjauan Sistem Informasi

### 2.2.1 Pengertian Sistem Informasi

Jogiyanto dalam Firamon Syakti (2013: 126) mendefinisikan suatu sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan, informasi didefinisikan sebagai suatu hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan sistem informasi menurut Jogiyanto merupakan sebuah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang.

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen dalam sebuah organisasi atau lembaga formal yang berhubungan dengan proses peng-akurat dengan melalui analisis yang rasional, serta ilmiah. Keandalan sistem informasi dalam sebuah lembaga terletak pada keterkaitan antara komponen yang ada (Asmara, 2016: 155). Pada perkembangannya sistem informasi yang menguakan teknologi informasi yang digunakan dapat berperan dalam strategi biaya, strategi diferensiasi dan strategi inovasi (Susanto dalam Asmara 2016: 155).

Adapun definisi Sistem Informasi menurut Azhar Susanto adalah sebagai berikut : “Sistem informasi adalah kumpulan dari subsistem apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna”. Sistem informasi saat ini sangat berguna bagi organisasi, salah satunya bidang pemerintahan, dengan sistem informasi proses mengumpulkan, menyimpan, menyediakan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan sangat dibutuhkan di era digital saat ini (Azhar Susanto dalam Asmara 2016: 82).

### **2.2.2 Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan**

Di era digital saat ini, peran teknologi tidak lepas dari genggaman sebuah organisasi, baik dalam menjalankan segala pelayanan akan berbarengan dengan penggunaan teknologi informasi di dalamnya. Sistem organisasi yang baik, yaitu sistem yang dapat memudahkan organisasi tersebut dalam upaya pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi menjadikan segala sesuatu yang berkaitan dengan data dan informasi menjadi hal yang paling penting. Analisis data dengan bantuan perangkat lunak yakni sistem informasi dapat mempermudah dan mempercepat kerja, serta menyelesaikan beragam permasalahan di dalam tubuh suatu organisasi.

Sistem informasi manajemen menurut Jogiyanto Hartono dalam Nurkholis (2015: 09), mendefinisikan bahwa sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut Raymond Coleman sistem informasi manajemen yang efektif juga merupakan sistem yang didalamnya dapat memberikan data yang cermat, tepat waktu, dan yang penting artinya bagi perencanaan, analisis, dan pengendalian manajemen untuk mengoptimalkan pertumbuhan organisasi. Sedangkan menurut George M. Scott yang diterjemahkan oleh Budiman (2001:100), mengemukakan Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan (Nurkholis 2015: 10).

Keberadaan informasi bagi suatu lembaga terbilang sangatlah penting, dengan informasi segala pekerjaan dan permasalahan dapat terselesaikan dengan efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan atau penyusunan suatu



program. Informasi yang bernilai tinggi sangat menentukan suatu kualitas dalam penyusunan program atau dalam pengambilan suatu keputusan.

Certo dan Certo dalam Etin Indrayani (2013: 02) menyebutkan beberapa faktor yang menentukan kualitas suatu informasi, sebagai berikut :

1) Ketepatan informasi

Ketepatan informasi ini diartikan sebagai kesesuaian antara informasi dengan situasi yang dihadapi oleh pengguna informasi itu sendiri.

2) Mutu informasi

Kadar mutu organisasi ditentukan sejauhmana informasi itu mencerminkan realitas. Semakin mendekati realitas, informasi bisa dikatakan bermutu.

3) Informasi yang *up to date*

Informasi yang digunakan memungkinkan untuk digunakan dalam pembuatan keputusan dan bisa bermanfaat dari informasi itu.

4) Kuantitas informasi

Merupakan jumlah dari informasi yang terkait dengan proses pengambilan keputusan atau penyusunan program.

Sistem teknologi dan informasi yang semakin pesat saat ini sangat penting keberadaannya di suatu lembaga, termasuk pemerintahan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta dalam penyusunan suatu kebijakan tersebut dibutuhkan informasi yang akurat, agar berjalannya suatu kebijakan sesuai dengan informasi yang ada atau yang menyangkut permasalahan masyarakat.

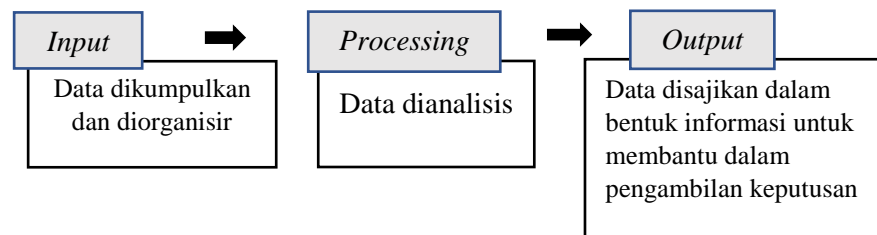
Dalam permasalahan program penanggulangan kemiskinan, praktiknya sistem informasi merupakan suatu jaringan yang mana didalamnya berisi informasi mengenai kemiskinan, serta data-data penduduk miskin. Sistem informasi dibuat secara terencana, suatu mekanisme yang sistematis yang menyediakan

data dan informasi yang relevan, sehingga dapat membantu pemerintah dalam penyusunan suatu program penanggulangan kemiskinan.

### 2.2.3 Peran Data dan Informasi dalam Penyusunan Program atau Pengambilan Putusan

O'Brien mendefinisikan data sebagai fakta mentah (*raw fact*) atau hasil gambaran atau rekaman pengamatan. O'Brien juga menambahkan bahwa ada berbagai macam bentuk data seperti data alfanumerik, data teks, gambar, dan audio. Untuk mendapatkan sebuah makna dari kumpulan data dan fakta, kita harus melakukan pengolahan data dahulu, fakta dan data yang telah diolah akan menjadi sebuah informasi. Informasi juga dapat diartikan sebagai hasil pengolahan data yang meliputi: hasil gabungan, hasil analisis, hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi (O'Brien dalam Indrayani 2013: 130).

Proses pengolahan data menjadi informasi dijelaskan dalam model *input-output*. Levin, dkk dalam Indrayani (2013: 130) menggambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Model Pengelolaan Data Menjadi Informasi**  
(Sumber : Levin, dkk dalam Indrayani diolah oleh peneliti, 2021)

Gambar di atas dapat dilihat bahwa input berupa data, setelah itu data dikumpulkan dan diorganisir sedemikian rupa agar bisa diolah, dan kemudian dianalisis. Hasil dari analisis data inilah yang menghasilkan suatu informasi. Informasi ini yang dijadikan acuan bagi para pemimpin dalam

penyusunan suatu program atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pengolahan data menjadi informasi melibatkan sejumlah sumber daya, mulai dari manusia, perangkat keras, sampai dengan perangkat lunak (Indrayani 2013: 131). Apalagi pada era modern sekarang ini, keberadaan jaringan komunikasi juga menjadi salah satu syarat penting dalam proses pengolahan informasi untuk mendukung pembuatan putusan dalam mengatasi berbagai permasalahan, seperti permasalahan kemiskinan yang harus segera ada penanggulangannya. Hal ini dengan berkembangnya sistem informasi akan menjadi pendukung bagi pemerintah dalam penyusunan program atau pengambilan keputusan terkait penanggulangan kemiskinan.

#### **2.2.4 Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS)**

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2017) menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Batas pemenuhan kebutuhan minimum mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional dan Gizi pada tahun 1978, yaitu nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori per orang setiap harinya. Sedangkan kebutuhan non pangan mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

Kemiskinan secara umum dilihat atas dasar pemenuhan kebutuhan atau materi yang dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi suatu rumah tangga dengan jumlah minimum kebutuhan hidup. Akan tetapi saat ini kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi

seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat (Provinsi Lampung, 2016: 08).

Mengingat permasalahan kemiskinan belum teratasi karena basis data yang tidak tepat sasaran, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai yang selanjutnya disebut Simnangkis Saburai menjadi bagian dari teknologi informasi yang lebih mengarah pada sistem data informasi. Aplikasi ini dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar dan teregistrasi. Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan dan menjawab amanat Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS) menyajikan data individu, rumah tangga, dan keluarga miskin yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program penanggulangan kemiskinan. Basis Data Terpadu (BDT) aplikasi ini berisi data sasaran 40% penduduk miskin terendah yang diinput *by name by address*, dengan memanfaatkan Basis Data Terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang akan menjadi data sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Simnangkis Saburai. Aplikasi ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat pemantauan (*monitoring*), evaluasi kebijakan, dan pelaporan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Adapun prioritas penanganan kemiskinan berdasarkan Kewilayahan (Angka Kemiskinan Tertinggi) atau berdasarkan Desil (Tingkat Kesejahteraan Terendah/Desil I), dengan prioritas program atau kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan (Beasiswa);
- b. Kesehatan (Iuran KIS, Program Makanan Tambahan, Kontrasepsi Subsidi);
- c. Permukiman (RTLH, Air Minum, Jamban);

- d. Sosial (Penyandang Cacat);
- e. Ekonomi (Perempuan, UKM, Petani, Nelayan dan Peternak);
- f. Ketenagakerjaan (Pelatihan).

Perkembangan sistem informasi dan teknologi yang semakin pesat diharapkan dapat memberikan peran dalam bidang pemerintahan untuk menanggulangi kemiskinan (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (SIMNANGKIS SABURAI) n.d.)

### **2.3 Penyusunan Program Pembangunan Daerah**

Program merupakan bentuk pengimplementasian dari kebijakan, kebijakan di level bawah dan yang lebih fokus atau operasional di tingkat kabupaten atau kota. Dalam menjalankan program harus selaras dengan kebijakan, satu kebijakan publik merupakan apapun yang pemerintah putuskan untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan. Suatu program publik berisi seluruh aktivitas yang didesain untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang akhirnya akan berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan pada pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (Nengyanti 2016: 23-24).

Menurut Irfan Islamy dalam Dengo (2019) menjelaskan kebijakan publik merupakan suatu serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Diartikan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Sedangkan menurut pendapat para ahli lainnya, Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- 1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

- 2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- 3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- 4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan atau keputusan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis (Chaizi Nasucha dalam Dengo 2019). Menurut Yulianti (2014: 06) Proses penyusunan kebijakan publik menjadi proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan publik terdapat beberapa tahapan, hal ini agar mempermudah kebijakan publik dibuat.

Berikut beberapa tahapan proses pembuatan atau penyusunan kebijakan publik sebagai siklus kebijakan (James Anderson dalam Yulianti, 2014: 07) diantaranya dimulai dengan identifikasi masalah dan formulasi agenda, dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan atau pelanjutan kebijakan. Sejalan dengan batasan ini, terdapat tiga aspek saling terkait dari pembentukan kebijakan yang diambil: sifat dari masalah publik, agenda dan proses penetapan agenda, dan penyusunan kebijakan yang diusulkan (atau alternatif) untuk menyelesaikan masalah, pembentukan kebijakan (*policy formation*) melambangkan proses total untuk menciptakan, mengadopsi, dan menerapkan suatu kebijakan. Ini juga dapat disebut sebagai proses kebijakan. Perumusan kebijakan (*Policy Formulation*), sebaliknya, mengacu hanya untuk menyusun alternatif atau opsi untuk menangani masalah (Anderson dalam Nengyanti, 2016: 25).

Tahap pertama, Penentuan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan merupakan tahap penetapan agenda kebijakan atau agenda *setting*. Agenda kebijakan atau agenda *setting* menurut Winarno dalam Yulianti (2014: 10) didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan menurut Kusumanegara (2010), agenda *setting* merupakan tahap dimana diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Pemerintah dihadapkan pada berbagai *issue* (masalah) yang ada di sekitarnya. Untuk itu, pada saat tertentu pemerintah harus memutuskan isu apa yang menjadi dasar dibuatnya suatu kebijakan publik (Yulianti 2014: 10).

Tahap kedua, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan atau *policy* formulation merupakan tahap selanjutnya setelah isu diagendakan. Menurut Jones dalam Nengyanti (2016 :25), formulasi merupakan suatu turunan dari formula, dan berarti untuk mengembangkan rencana, metode, resep. Dalam hal ini, untuk meningkatkan suatu kebutuhan untuk mengambil tindakan dalam mengatasi suatu masalah. Masalah yang masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh aktor perumus kebijakan. Masalah tersebut dibahas sesuai tingkat urgensinya dalam pemecahannya. Formulasi tidak bisa diabaikan karena hal ini menunjang dalam keberhasilan kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan.

Dalam perumusan masalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, masalah yang diusulkan harus berdasarkan informasi dan data yang bebas dari rekayasa. Kepalsuan data atau informasi akan mempengaruhi proses formulasi kebijakan karena akan memberikan hasil yang palsu juga. Hal ini terkesan bahwa masalah yang dirumuskan telah dipolitisir oleh elit yang menggunakan kesempatan kekuasaannya. Kedua, cara pengolahan data. Pengolahan data seringkali tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kesalahan dalam pengolahan akan mempengaruhi rumusan masalah. Menurut Indrayani (2013: 131) Proses pengolahan data menjadi informasi bisa dijelaskan dengan model *input-output* yang hasil akhirnya data disajikan sebagai informasi untuk membantu pengambilan suatu keputusan. Ketiga, cara penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan tidak boleh berlebihan atau sebaliknya. Diperlukan sebuah

indikator tertentu yang dapat diterima, misalnya kecenderungan menunjukkan diatas rata-rata nasional atau jauh dibawah rata-rata nasional sehingga membutuhkan intervensi serius dan segera (Yulianti, 2014: 28–29).

Tahapan berikutnya adalah *policy implementation* atau implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan diartikan sebagai tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan dan peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserah tugas melaksanakan program.

Tahap akhir setelahnya, yakni evaluasi kebijakan. Lester dan Stewart dalam Yulianti (2014: 48) menyatakan evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Kajian yang memberi deskripsi dan eksplanasi atas eksistensi kebijakan tidak termasuk dalam studi evaluasi. Sedangkan menurut Rossi dan Freeman, evaluasi digunakan untuk memperelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu proses untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik. Evaluasi, tidak saja berguna untuk menjustifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan, tetapi juga untuk melihat kegunaan program dan insiatif baru, meningkatkan efektivitas manajemen dan administrasi program, dan mempertanggungjawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut (Pasolong, 2007, p. 60 dalam Yulianti 2014).

Berdasarkan penjelasan penyusunan program di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini sistem informasi mempunyai peranan penting dalam pembuatan atau penyusunan suatu kebijakan atau program. Hal ini karena dalam penyusunan atau pengambilan keputusan dibutuhkan data dan informasi yang akurat, hal ini untuk menentukan kualitas identifikasi masalah dan untuk menghasilkan program yang tepat sasaran. Data atau informasi memegang peran penting. Informasi yang lengkap akan menentukan kualitas identifikasi



masalah. Informasi yang berkualitas juga merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dalam membuat putusan atau kebijakan, yaitu informasi yang lengkap memuat atau mendeskripsikan variabel atau komponen masalah. Kesalahan dalam mengemukakan alternatif, bahkan sampai dengan menentukan alternatif yang akan diambil untuk pengambilan putusan, berawal dari kurang lengkapnya atau tidak tepatnya informasi yang diperoleh pimpinan.

## **2.4 Kerangka Pikir**

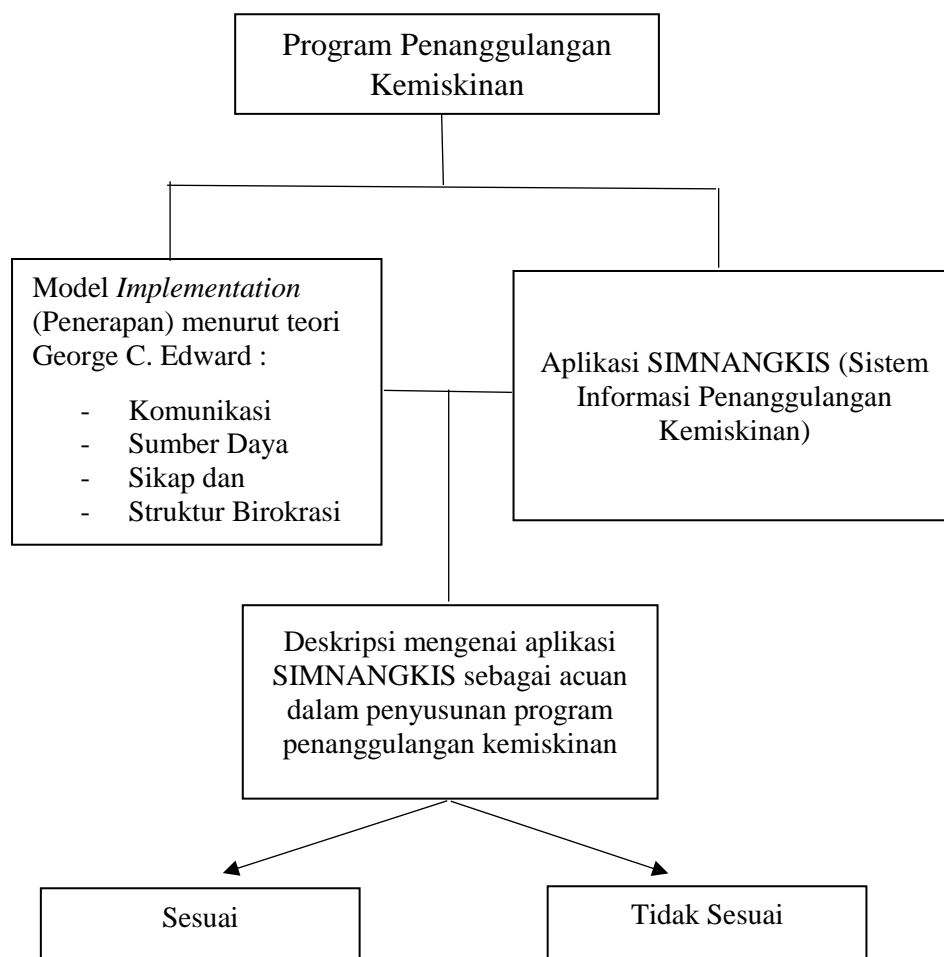
Program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan pemerintah, sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Namun, upaya pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan yang sudah direalisasikan saat ini belum terlaksana secara optimal dan belum dapat dikatakan berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan. Permasalahan yang sering terjadi dalam program-program pengentasan kemiskinan, yaitu tidak akuratnya data. Data kemiskinan yang tidak akurat dan tidak tertata baik menyebabkan permasalahan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang menjadikan program tersebut tidak selarasnya antara program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga angka kemiskinan tidak serta-merta menurun.

Bappeda Provinsi Lampung meluncurkan sebuah aplikasi sistem informasi bertajuk Simnangkis, sistem informasi ini merupakan suatu jaringan yang mana didalamnya berisi informasi mengenai kemiskinan, serta data-data penduduk miskin. Sistem informasi dibuat secara terencana, suatu mekanisme yang sistematis yang menyediakan data dan informasi yang relevan, sehingga dapat

membantu pemerintah dalam penyusunan suatu program pengentasan kemiskinan.

Akhir dari penelitian ini akan memperlihatkan suatu penerapan sistem informasi dari sebuah aplikasi Simnangkis yang diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Pikir**  
(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021)

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Riset deskriptif adalah riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakter / karakteristik atau fungsi dari sesuatu hal. Menurut Neuman dalam **Rohidin (2010: 44-45)** bahwa “*descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, sosial setting, or relationship*”. Secara deskriptif penelitian ini bertujuan menggambarkan penerapan suatu sistem informasi penanggulangan kemiskinan, penerapan sistem ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini : Pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung (BAPPEDA) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKP) Lampung. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti secara langsung terkait penerapan sistem informasi penanggulangan kemiskinan. Kedua, lokasi penelitian ini merupakan lokasi magang atau praktik kerja lapangan peneliti.

Ketiga, Lokasi penelitian ini belum pernah ada penelitian dengan judul serupa yang akan peneliti teliti.

### 3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif masalah bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu dalam penetapan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong dalam Kusumastuti, 2019: 25-26).

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2019: 275) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam melakukan sebuah penelitian, fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Hal ini agar seorang peneliti tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga untuk menghindari hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Penetapan fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu Penerapan aplikasi “Simnangkis” yang dilihat dari empat indikator teori implementasi, yaitu : komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*Resource*), Sikap (*Disposition*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

#### 1) Komunikasi (*Communications*)

Pada aspek komunikasi, peneliti akan melihat pola komunikasi antar para pelaksana kebijakan, sebagai ukuran dalam implementasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian

tujuan kebijakan, sehingga peneliti akan melihat bagaimana komunikasi dari penerapan aplikasi Simnangkis agar dapat mencapai tujuan kebijakan..

2) Sumber Daya (*Resource*)

Pada aspek sumber daya, kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia, maupun finansial sangat menentukan keberhasilan dalam berjalannya suatu kebijakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan melihat peran penting sumber daya manusia dalam keberhasilan aplikasi Simangkis untuk mencapai tujuannya.

3) Sikap (*disposition*)

Pada aspek sikap, peneliti akan melihat bagaimana sikap para pelaksana dari penerapan Simnangkis tersebut. Aspek sikap (*disposition*) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan. Jika *implementor* setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah (Edward III dalam Natsir, 2017: 21).

4) Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Pada aspek struktur birokrasi, peneliti akan melihat peranan penting struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan dari penerapan aplikasi Simnangkis, yakni untuk melihat seberapa jauh rentang kendali antara pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana, seperti adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

### 3.4 Informan

Informan dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pemilihan informan yang akan di wawancarai dilakukan secara *purposive*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dan kita teliti. Dalam penentuan sampel dalam penelitian kualitatif biasa peneliti mulai menentukan pada awal memasuki lapangan dan selama peneliti berlangsung (Sugiyono, 2019: 289)

Adapun beberapa informan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Daftar Informan**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Eka Yuslita Dewi, ST., MT.	Perempuan	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia
2.	Prayudi Aribowo, S.STP.	Laki-laki	Kassubid Perencanaan dan Pembangunan Manusia I
3.	Puriatma Nur Utomo, S.STP.	Laki-laki	Analisis Perencanaan dan Kerjasama Subbid P3M I
4.	Vira	Perempuan	Staff Operator Pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021)

### **3.5 Sumber Data**

Data merupakan hasil pengamatan yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Jika dilihat dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder (Sarwono, 2006: 206).

Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **1) Data Primer**

Data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara, data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data primer dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem informasi penanggulangan kemiskinan, serta data-data yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

#### **2) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Pada data sekunder ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur, jurnal artikel, serta situs di internet yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang

sesuai standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019: 296). Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1) Observasi

Menurut Sarwono (2006: 224) observasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi pencacatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam melakukan kegiatan observasi, peneliti wajib turun ke lapangan untuk dapat mengamati suatu hal dalam penelitiannya.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara si penanya dan si penjawab. Sementara menurut Esterberg dalam Sugiyono, (2019: 304) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasilnya dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data dan informasi bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiyono (2019: 314) dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi dijadikan sebagai alat bantu untuk pengumpulan data dalam memperoleh data sekunder. Data dalam dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental dari seseorang.



### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul adapun kegiatan pengolahan data, antara lain:

#### 1) Editing Data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan suatu kejelasan penelitian yang layak ditampilkan. Data-data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dilakukan penyuntingan kata-kata dan dideskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungkan dan sajikan.

#### 2) Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk menganalisa kembali data penelitian yang telah dideskripsikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pada tahap intrepretasi penelitian ini, data-data yang sudah terkumpul dan diedit oleh peneliti akan dicocokkan kembali dan digabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dijabarkan sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang relevan.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini lebih banyak uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Noeng Muhadjir dalam Rijali (2018: 84) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”. Dalam analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dalam proses analisis data dibagi ke dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019: 321). Ketiga alur tersebut yaitu :

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis dalam merangkum, memilih, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Biasanya hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya.

#### 2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

#### 3) Penarikan Kesimpulan

Upaya dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama di lapangan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian merupakan pengambilan intisari dari hasil temuan penelitian yang menggambarkan pendapat akhir berdasarkan uraian-uraian sebelumnya.

### 3.9 Teknik Validasi Data

Menurut Sugiyono (2019: 361) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan pada peneliti. Hal ini menjelaskan bahwa data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam proses validasi data ada beberapa tahapan dalam teknik pemeriksaan validasi. Teknik validasi merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau diperoleh dari penelitian, hal ini bertujuan agar semua data yang disajikan nantinya dapat dinikmati dari segala sisi (Lexy Moleong, 2017).

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan validitas data sebagai *instrument* penelitian yang dapat menemukan suatu kondisi atau kejadian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas data dengan metode triangulasi. Menurut Sugiyono, (2019: 368) menjelaskan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Bappeda Provinsi Lampung**

#### **4.1.1 Sejarah Bappeda Provinsi Lampung**

Bappeda Provinsi Lampung pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, dan Permendagri Nomor 185 Tahun 1980, serta Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1981, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Era Desentralisasi atau Otonomi Daerah, Bappeda Provinsi Lampung dibangun kembali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, dan ditetapkan dalam bentuk struktur organisasi “Badan Provinsi” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, terdapat perubahan mendasar dan sangat signifikan, antara struktur Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981 dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Ketua Bappeda Tingkat I Lampung” menjadi “Kepala Bappeda Provinsi Lampung”, (2) dihapuskannya posisi Wakil Ketua Bappeda pada eselon IIB, (3) dileburkannya Organisasi Biro PDE (Pusat Data Elektronik) ke dalam Bappeda, (4) dihapuskannya “Bidang Penelitian” pada Bappeda dan (5) dibentuknya Balitbang Provinsi. Tetapi, pada tahun 2007 dilakukan kembali evaluasi terhadap seluruh organisasi untuk melihat efektivitas struktur organisasi yang ada sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang hasilnya ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009,

Bappeda saat ini mendapat tambahan dua bidang kembali yaitu UPT Data dan Bidang Penelitian yang merupakan penggabungan kembali Balitbangda ke dalam organisasi Bappeda pada Tahun 2013 dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2013. Berdasarkan Struktur Organisasi Bappeda yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 03 Tahun 2014 Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 terjadi perubahan Struktur Bappeda Provinsi Lampung dengan penambahan Bidang Pendanaan dan Pembangunan, serta penghapusan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan menjadi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah mengalami perubahan kewenangan sehingga nomenklatur maupun struktur organisasi OPD perlu disesuaikan. Perubahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam penetapan program dan kegiatan nasional;
- d. Penyusunan PPA berkoordinasi dengan TPAD;

- e. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergisitas antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Pengoordinasian kelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan, serta pengalokasian dana untuk pembangunan daerah;
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh perangkat daerah Provinsi;
- j. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada Bappeda;
- k. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi terdiri dari : Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

#### **4.1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Lampung**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Lampung**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung saat ini dan mengingat perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung (BAPPEDA) Provinsi Lampung perlu disusun rumusan visi dan misi.

Berikut visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Provinsi Lampung :

**Tabel 4.1 Visi dan Misi**

<b>Visi</b>	Rakyat Lampung Berjaya, Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera.
<b>Misi</b>	Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman, dan aman.
	Mewujudkan ( <i>good governance</i> ) untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik.
	Mengembangkan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.

*(Sumber : Diolah Peneliti dari Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Provinsi Lampung, 2022)*

#### **4.1.4 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai Bappeda Provinsi Lampung**

Adapun nama dan struktur jabatan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Nama dan Struktur Jabatan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Ir. Mulyadi Irsan, M.T.	Kepala Badan
2.	Dra. Evie Fatmawaty, M.Si	Sekretaris
3.	Zakiah Drajat, S.I.Kom	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Siti Masitoh, SE	Staf



5.	Agus Guntur Sukmono, SE	Kasubbag Keuangan dan Aset
6.	Syahril Jaya Saputra, ST	Staf
8.	M.Roby Satria Pratama, ST	Kassubag Program
9.	Ratih Widiyanti, SE.	Staf
11.	Ir. Ahmad Lianurzen, MT	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
12.	Riya Soneta, S. Kom	Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
13.	Muhammad Fauzi, S.T., M.E	Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II
14.	Merylia,ST,MT,MSc	Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III
15.	Bobby Irawan, S.E, M.Si	Kabid Perencanaan Perekonomian

16.	Haryo Wicaksono, SE	Kasubbid Perencanaan Perekonomian I
17.	Dharma Saputra, SE, MH	Kasubbid Perencanaan Perekonomian II
18.	Naomi Setyawati, SE	Kasubbid Perencanaan Perekonomian III
19.	Eka Yuslita Dewi, ST., MT	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
20.	Prayudi Aribowo, S.STP	Kasubbid Perencanaan dan Pembangunan Manusia I
21.	Silfa Gusman, SE	Kasubbid Perencanaan dan Pembangunan Manusia II
22.	Ridwan Saifuddin, S.E., M. Si	Kasubbid Perencanaan dan Pembangunan Manusia III
23.	Ir.Marlina Emidianti, M.Si	Kabid Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
24.	Era Jayanti, S.STP, MM	Kasubbid Monitoring dan Evaluasi

25.	Catur Makhmudi, S.Hut, M.I.L	Kasubbid Perencanaan Makro
26.	Salisiara, S.E	Kasubbid Pengendalian Kebijakan
27.	Belli Pahlupi, ST, MT	Kepala UPTD Pusat Data & Informasi Pembangunan Daerah

*(Sumber : Diolah Peneliti dari Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Provinsi Lampung, 2022)*

Adapun susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari :

- a) Kepala Badan.
- b) Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Program.
- c) Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Makro;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian Kebijakan; dan
  - 3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- d) Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pertanian;
  - 2) Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
  - 3) Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan.
- e) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pemerintahan:

- 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
  - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
- 1) Sub Bidang Infrastruktur;
  - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman; dan
  - 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- g) Unit Pelaksana Teknis Data (UPTD);
- h) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
1. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  2. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  3. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  4. Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  5. Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
7. Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai penerapan aplikasi Simnangkis yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat peneliti simpulkan berdasarkan Teori Implementasi menurut George C. Edward, sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Penerapan Simnangkis pada indikator komunikasi dinilai cukup baik, hal ini berdasarkan data dan informasi yang didapat bahwa sebelum penerapan aplikasi Simnangkis, dilaksanakannya sebuah sosialisasi antar OPD untuk membangun keseragaman pandangan terkait tujuan sistem aplikasi tersebut. Penerapan aplikasi ini memiliki komunikasi antar OPD yang terjaga, sehingga para *implementor* dapat mencapai suatu tujuan dari penerapan aplikasi tersebut. Keberhasilan sistem aplikasi ini menghasilkan sebuah data yang akurat dan terpadu yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mencanangkan suatu program kemiskinan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri.

#### 2. Sumber Daya Manusia

Pada indikator Sumber Daya Manusia, sistem aplikasi Simnangkis didukung oleh SDM yang berkualitas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung membangun sebuah Tim TKPK atau Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai tim operator dalam sistem aplikasi Simnangkis. SDM pada penerapan aplikasi tersebut memiliki kemampuan langsung dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, sehingga proses penerapan aplikasi Simnangkis dapat berjalan dengan lancar. Dalam peningkatan kemampuan SDM terkait penerapan aplikasi ini, Tim TKPK mendapatkan pelatihan tenaga untuk pengoperasian penerapan sistem Simnangkis tersebut.

### 3. Sikap atau *Disposisi*

Pada indikator Sikap, penerapan aplikasi ini mendapat tanggapan baik dari Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lain, dikarenakan terkadang ada beberapa OPD yang memiliki suatu program, namun tidak mengetahui sasaran untuk program tersebut. Jadi dapat disimpulkan penerapan aplikasi Simnangkis mendapat banyak persetujuan dan tanggapan baik dari setiap OPD.

### 4. Struktur Birokrasi

Pada indikator Struktur Birokrasi terkait pengawasan dalam sistem tersebut, Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan *updating* data-data kemiskinan, hal ini dikarenakan pengawasan terkait data kemiskinan dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat di bawah Kementerian Sosial, jadi disimpulkan pengawasan terkait data berada pada Pemerintah Pusat, sedangkan dalam pengawasan terkait sistem aplikasi berada pada Tim TKPK Provinsi Lampung.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aplikasi Simnangkis, peneliti memberi saran, sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan aplikasi Simnangkis didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berbentuk Tim TKPK, dalam meningkatkan kualitas SDM terkait penerapan aplikasi Simnangkis, peneliti memberikan saran agar Pemerintah Daerah menambahkan pelatihan yang berbentuk apa yang dapat membentuk kualitas Tim TKPK, pelatihan tersebut dapat berbentuk pelatihan digitalisasi, data *science*, pemahaman tentang kemiskinan, dan hal apapun yang dapat membentuk kualitas Tim TKPK, serta kualitas aplikasi Simnangkis tersebut.
2. Bagi para OPD, agar terus memperkuat dalam menjalin komunikasi terkait sistem aplikasi Simnangkis, peneliti pun memberikan saran agar sinergitas antar Perangkat Daerah terus terjaga, hal ini untuk menunjang dalam mencapai keberhasilan suatu program untuk dapat memprioritaskan lokus sasaran program pada Kabupaten/Kota yang menjadi Kemiskinan Ekstrim atau desil I.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Indrayani, Etin dan Gatningsih. 2013. *Sistem Informasi Manajemen SIM Pemerintahan*.

Kusumastuti, Ahmad dan Khoiron Ahmad. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed. Fitratun dan Sukarno Annisya. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Lexy, Moleong. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

### **Skripsi/Thesis :**

Natsir, Imaryani. 2017. “*Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.*” Skripsi.

Nengyanti. 2016. “*Penyusunan Program Pengentasan Kemiskinan Yang Responsif Gender Di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.*” Universitas Padjajaran Bandung.

Nurkholis, Nur. 2015. “*Penerapan E-Government Di Kota Bandar Lampung ( Studi Terhadap SIDALMENTEL Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandar Lampung).*” Universitas Lampung.

Rahmawati, A. 2020. “*Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone.*” Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rohidin. 2010. “*Perbandingan Perilaku-Methodologi.*” Universitas Indonesia.

Yulianti. 2014. *"Tahapan Dalam Siklus Kebijakan Publik."* Universitas Jenderal Soedirman.

### **Jurnal :**

Asmara, Rini. 2016. "Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman." *jurnal J-Click* 03(May): 31–48.

Dengo, Salmin. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* 5 (79).

Imam Hasyah. 2021. "Analisa Penerapan Sigertak Plus Di Bappeda Sumsel." *Universitas Bina darma*: 1–16.

Istan, Muhammad. 2017. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2(1): 81.

Nasution, Muhammad Irfan, and Nurwani. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKD) Kota Medan." *Jurnal Akutansi dan Keuangan* 9(2): 109–16.

Nugroho, Ade Putra K. 2015. "Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Aplikasi Madani Sinangkis Di Kota Serang)." : 1–16.

Qinthara, Syahriar Rizky dan, and Syahriar Ari. 2006. "Peran Teknologi Informasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* 08: 133–38.

Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33): 81.

Setya, Purnomo Agus dan Utami Sefty. 2018. "Analisis Implementasi Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (e-JKPP)* 04(1).

Suradi, Irmayani. 2018. "Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data Di Kota Semarang." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 8(01): 1–13.

Syakti, Firamon. 2013. "Sistem Informasi Data Kemiskinan." *Seminar Nasional Informatika 2013* (12): 125–32.

**Dokumen :**

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung.  
“LP2KD Provinsi Lampung Tahun 2016.”

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung.  
“LP2KD Provinsi Lampung Tahun 2019.”

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung.  
“LP2KD Provinsi Lampung Tahun 2020.”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi  
Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (SIMNANGKIS  
SABURAI).

Peraturan Presiden RI No 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan  
Kemiskinan.

Peraturan Presiden RI No 166 Tahun 2014, tentang Program Percepatan  
Penanggulangan Kemiskinan.

**Website**

Ardhia, Dhea. 2019. “Kenapa Indonesia Gagal Dalam Menghadapi Kemiskinan?”  
*kompas.com*:  
<https://www.kompasiana.com/deardhia5804/5dae63bb0d82303d7559e203/kemiskinan-jenis-jenis-penyebab-dan-dampak> (*October 31, 2021*).

Rifan, Aditya. 2021. “Apa Itu Implementasi? Tujuan Dan Contoh Penerapannya.”  
<https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya?page=all> (*January 22, 2022*).